

BAB II

LANDASAN TEORETIS

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penjelasan atas landasan teori atau konsep-konsep yang penulis gunakan dalam karya tulis yang berjudul *Pemikiran Anarkisme Pendidikan Ivan Illich Tentang Masyarakat Tanpa Sekolah*.

Dalam Bab II mengenai landasan teori ini setidaknya akan dijelaskan tiga hal pokok. Pertama adalah mengenai penjelasan serta definisi mengenai anarkisme baik secara politis ataupun sikap. Kemudian adalah varian dan tipe-tipe anarkisme yang populer di dunia dan peranan atau sudut pandang anarkisme terhadap pendidikan, dan yang terakhir adalah perkembangan institusi-institusi baik non-formal ataupun perkembangan pendidikan informal sebagai dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas ketidakpercayaan terhadap pendidikan formal yang ada.

A. Anarkisme

1. Definisi Anarkisme

Anarkisme adalah suatu filosofi politik yang membela kerjasama bebas yang tidak dilembagakan (terdesinstitusikan), dalam sebuah praktek demokrasi langsung yang bersifat partisipasional, dan biasanya terjadi pada era paska sosialis (O'Neil, 2004: 594), hal ini berarti bahwa masyarakat anarkis hanya akan terbentuk ketika institusi negara sudah tidak ada, dan atau segala sistem pemerintahan apapun itu sudah tidak berlaku lagi. Mansour Fakih berpendapat

jika anarkisme juga berarti suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan segala otoritasnya adalah lembaga-lembaga yang menimbulkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu Negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan atau sama sekali dihancurkan dalam kehidupan masyarakat. Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota dari masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan (Fakih, M. dalam, <http://www.Pahamyangtakpernahpadam.Pustaka.Otonomis.org>, diunduh tanggal 09-10-11).

Anarkisme berasal dari kata dasar "anarki" dengan imbuhan *-isme*. Kata anarki merupakan kata serapan dari *anarchy* (bahasa Inggris) atau *anarchie* (Belanda/Jerman/Perancis), yang berakar dari kata bahasa Yunani.

“Artinya kondisi dimana ‘tidak satupun yang lestari’ –terjemahannya, tak seorangpun punya hak untuk menduduki posisi yang memungkinkannya menguasai atau mengatur sesama manusia menurut kemauannya sendiri” (Naomi [ed], 2004: 466).

Ini merupakan kata bentukan *a-* (tidak/tanpa/nihil/negasi) yang disisipkan (n) dengan kata *archos* atau *archein* (pemerintah/kekuasaan atau pihak yang menerapkan kontrol dan otoritas - secara koersif, represif, termasuk perbudakan dan tirani); maka, *anarchos/anarchein* berarti "tanpa pemerintahan" atau "pengelolaan dan koordinasi *tanpa* hubungan memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan

dikendalikan, dan lain sebagainya". Mengenai keberadaan Negara sebagai otoritas

Bakunin mengatakan jika

“If there is a State, there must be domination of one class by another and, as a result, slavery; the State without slavery is unthinkable – and this is why we are the enemies of the State” (<http://www.marxist.org/anarchist/archive/bakunin/works.html>)

(Jika terdapat Negara, disana pastilah terdapat dominasi antara satu kelas terhadap kelas lainnya dan, hasilnya adalah, perbudakan; Negara tanpa perbudakan adalah tidak mungkin – dan karena alasan inilah kenapa kita bermusuhan dengan Negara)

Bentuk kata "anarkis" berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki, sedangkan akhiran *-isme* sendiri berarti paham/ajaran/ideologi. Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. “Ia dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia” (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme>). Dengan penuh optimisme Proudhon menjelaskan jika anarki “adalah ketiadaan penguasa atau raja dan merupakan bentuk pemerintahan dimana setiap hari manusia mendekatinya” (Proudhon, 19840: 339).

Dalam pengertian tradisional pemerintahan didirikan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, serta untuk melindungi rakyat dari tindakan kekerasan antar sesama mereka maupun ancaman dari luar negeri. Karena itu jika mengambil pengertian berdasarkan definisi diatas, maka anarkisme berarti tak ada ketertiban sama sekali dan tak ada perlindungan sama sekali. Anarki berarti kekacauan dan kekisruhan.

“Namun kaum anarkis mengklaim *sebaliknya*” (Naomi [ed], 2004: 463).

Menurut mereka masyarakat yang diurus oleh pemerintah tak bisa teratur, justru

“...*pemerintahlah* pencipta dan pelestari kekacauan dan kekisruhan” (Naomi [ed], 2004: 463). Walaupun beberapa fraksi dari anarkis tidak melakukan aksi-aksi kekerasan, sebenarnya pada beberapa kesempatan, beberapa fraksi dari anarkis memang menghalalkan kekerasan sebagai jalan keluar. Contohnya adalah Bakunin itu sendiri, pasca Internationale pertama menurut Simon Tormey (2004) ia bergabung dengan kelompok teroris Rusia dan melakukan beberapa pengeboman di daerah-daerah Rusia. Dikemudian hari dalam perjalanannya terutama setelah Internationale pertama, meskipun Anarkisme secara politis dan historis bermusuhan dengan kaum Marxis, akan tetapi sesungguhnya mereka berhutang banyak terhadap penggunaan analisis Marxian (terutama sekali adalah terhadap analisis kelas dalam perspektif determinan ekonomis) dalam rangkaian konsepsi analisis kelas sosialnya.

Anarkisme mengambil berbagai bentuk dan spektrum, yakni dari Anarkisme aliran kiri dan ekstrim kiri, maupun anarkisme aliran kanan bahkan sampai anarkisme ekstrem kanan yang berwatak individualistik. Meskipun anarkisme kelihatannya berakar pada paham kebebasan individual yang liberal, namun lokasi konflik pemahannya justru pada pada titik yang terletak antara negara dan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai aliran, pemikiran kaum anarkisme berpusat dalam berpendirian terhadap konflik antara negara dengan masyarakat tersebut, namun pendirian-pendirian mereka sesungguhnya secara sederhana dapat dikategorikan kedalam Anarki individualistik dan anarki sosialistik. Anarki Individualistik berangkat dari cita cita kebebasan individual, serta berpangkal juga dari kedaulatan individual atas pemilikan harta dan kekayaan pribadi, serta

kepemilikan *privat*. Dengan demikian arah anarki individualis ini adalah suatu bentuk dari anarki kapitalisme. Sementara anarki kiri yang berwatak sosialistik justru berangkat dari penolakan terhadap kekayaan pribadi dan negara yang menurut mereka sebagai sumber penyebab dari ketidakadilan sosial. Keduanya, baik anarki yang bersifat individualis maupun yang sosialistik memiliki sikap pendirian atas perlunya pembatasan kekuasaan dan keperkasaan negara terhadap individu dalam kelompok-kelompok masyarakat. Pendek kata paham ini adalah perkawinan antara paham yang bercorak liberalistik dan sosialisme. Itulah mereka juga disebut sebagai kaum Sosialisme Libertarian (Mansour Fakih dalam, http://www.Pahamyangtakpernahpadam.Pustaka_Otonomis.org, diunduh tanggal 09-10-11).

Anarkisme adalah sebuah utopis (Plekanov, 2004: 5), dan sudah sebuah kepastian jika setiap visi yang ideal adalah merupakan sebuah utopis, bahkan masyarakat tanpa kelas yang diidamkan Komunis sekalipun. Dalam setiap visi yang ideal akan selalu memiliki teori-teori dan cara-caranya tersendiri menuju visi ideal itu. Komunismenya Marx akan menjadi hambar jika tidak ada Lenin yang memberikan teori-teori revolusionernya dalam *What is To Be Done* (1918), dan begitu juga dengan anarkisme

By the word [Anarchy] I wanted to indicate the extreme limit of political progress. Anarchy, if it may be permitted to put in this way, a form of government or constitution in which public and private consciousness, formed through the development of science and law, is alone sufficient to maintain order and guarantee all liberties. In it, as consequence, the institution of police, preventive and repressive methods, officialdom, taxation, etc., are reduced to a minimum. (Proudhon, 1864: 31-32)

(melalui kata [anarki] saya ingin mengusulkan pembatasan kemajuan politik yang ekstrim. Anarki jika saya diperkenankan menjelaskan seperti ini, sebuah bentuk pemerintahan atau konstitusi dimana kesadaran umum dan pribadi dibentuk melalui perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan, cukup untuk memiliki kemampuan untuk memelihara tatanan dan garansi kebebasan. Sebagai konsekuensinya, institusi kepolisian metode-metode pencegahan dan penindasan, administrasi perpajakan, dsb., direduksi pada sebuah batasan minimum)

Anarkisme biasanya merujuk pada tiga nama teoritis yang paling terkenal diantara mereka yaitu Mikail Bakunin, Peter Kropotkin, dan Joseph Piere Proudhon. Ketiganya mewakili beragam varian anarkisme yang berbeda. Bakunin dikenal sebagai tokoh dari anarko-sindikalis, Kropotkin dengan anarko-komunis, dan Proudhon dianggap oleh banyak orang sebagai seorang anarko-utopis. Meskipun pasca revolusi Prancis ia dianggap meninggalkan anarkismenya dan kemudian menjadi seorang federalis, karena bagi dia ini adalah salah satu jalan yang terbaik untuk menjembatani antara kontrol mutlak dari otoritas dengan kepentingan atas kebebasan individu.

Tatanan sosial yang baru dalam masyarakat anarkis dibangun melalui sebuah kontrak. “Kontrak sosial dalam rumusan Proudhon berbeda dengan kontrak sosial yang menempatkan negara sebagai instrumen pengatur tatanan [sosial]” (Mulyana, 2009: 107). Menurut Proudhon, kontrak sosial bukanlah persetujuan antara warga negara dengan pemerintah, melainkan persetujuan antara seseorang dengan orang lainnya dimana melalui kontrak masyarakat akan muncul.

“Sebuah kontrak adalah sebuah penetapan dimana dua individu atau lebih bersepakat untuk mengatur sebuah industri, atau yang disebut pertukaran, dalam batasan-batasan atau kurun waktu tertentu. Konsekwensinya, mereka melakukan kewajiban-kewajiban dan jaminan timbal-balik untuk sejumlah layanan, produk, keuntungan, dan sebagainya, ketika mereka dalam posisi untuk mendapatkan dan memberikan, juga menyadari bahwa

mereka dalam kondisi independen dan dihormati oleh pihak dalam memproduksi atau mendapatkan produk” (Mulyana, 2009: 108) .

Bagi Proudhon, kontrak sosial merupakan keputusan tertinggi dimana tiap-tiap warga negara menjanjikan cintanya, intelegensianya, kerjanya, layanannya, dan produknya dalam pertukaran dalam bentuk kasih sayang, ide-ide, produk-produk dan layanan dari warga negara lainnya (Proudhon, 1851: 188). Secara mudah dapat diartikan sebagai apa yang tiap individu inginkan dari masyarakat tergantung dengan apa yang ia berikan pada masyarakat itu juga. Jika seseorang memberikan kontribusi, maka sewajarnya ia mendapatkan kompensasi dari apa yang telah ia kerjakan.

“Dalam anarki, pemerintahan akan digantikan oleh organisasi Industri. Kekuasaan politik akan digantikan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi” (Proudhon dalam Mulyana, 2009: 110).

Lazimnya ide-ide revolusioner, maka ia membutuhkan teori-teori revolusioner. Marxisme disandingkan dengan Leninisme, -meskipun bukan merupakan perbandingan yang sepadan karena tiap-tiap varian anarkisme memiliki caranya sendiri menuju revolusi anarkisme, tapi penulis mencantumkan teori revolusi yang dikemukakan oleh Proudhon.

Revolusi yang secara gampang berarti perubahan struktur pemerintahan dan struktur sosial masyarakat dalam waktu cepat –yang dalam terminologi marxist keduanya disebut sebagai basis struktur dan suprastruktur. Untuk menambah jelas mengenai revolusi itu apa penulis menambahkan pengertian dari Proudhon jika revolusi ialah “sebuah kekuatan tak terlawan, yang melalui sifat

dasarnya, memperoleh kekuatan dan tumbuh melalui posisi yang berlawanan dengan lawannya (Proudhon, 1851: 101).

Sebuah revolusi dapat diarahkan, dilambatkan atau dikendalikan. Ajaran terbijak dalam politik menurut Proudhon adalah memberikan revolusi sebuah jalan inci demi inci agar revolusi tanpa terasa dan tanpa menimbulkan pergolakan dan tanpa loncatan dan lompatan (Mulyana, 2009: 111). Penegasan ini adalah sebuah negasi atas teori Marxisme mengenai lompatan kualitatif dan lompatan kuantitatif dalam revolusi dan setelahnya.

Pada tahapan awal, revolusi menyatakan untuk menyuarakan keluhan-keluhan yang ada pada masyarakat, mengajukan dakwaan terhadap sebuah pengelolaan negara yang korup, dimana orang-orang miskin selalu menjadi orang pertama yang menderita. Bukanlah sifat utama sifat dari rakyat jelata untuk memberontak, kecuali terhadap apa yang merugikan mereka secara fisik ataupun moral (Proudhon, 1851: 102).

Bagi Proudhon ada satu jalan untuk menghindari bahaya revolusi, yaitu membuat revolusi menjadi logis. Dengan begitu maka revolusi akan terjadi tanpa menyebabkan kekacauan, sebagai bagaian dari perkembangan alamiah dan tepat dari tatanan lama menuju tautan baru, dan tak akan ada orang yang mencatat dan menduga bahwa revolusi sedang dilakukan (Proudhon, 1851: 102).

Bagi Proudhon, dalam menyusun masyarakat anarkis ia memiliki visi yang berbeda dengan kaum sosialis lainnya yang melalui sebuah revolusi sosial atau cara yang utopian. Ia tidak juga seperti Bakunin jika masyarakat anarkis harus dibentuk melalui sebuah revolusi dan/atau propaganda melalui tindakan

(Mulyana, 2009: 114). Ia memandang bahwa masyarakat anarkis haruslah dibentuk melalui sebuah reduksi, penyederhanaan, desentralisasi sistem politik dan pemerintahan dan segala roda-roda mesin raksasa atau yang disebut negara kedalam sistem ekonomi (Proudhon; 1851: 173).

Proudhon dengan tegas menolak aksi-aksi revolusioner sebagai alat-alat reformasi sosial, karena dipandang palsu dan hanya akan menjadi sebuah bentuk dari kesewenang-wenangan yang akhirnya menjadi kontradiktif dengan tujuan awal sebelum revolusi, berikut pernyataannya

“We desire a peaceful revolution... you should make use of the very institutions wich we charge you to abolish... in such a way that the new society may appear as the spontaneous, natural and necessary development of the old and that the reovlution, while abrogating the old order, should nevertheless be derived from it...” (Proudhon, 1851: 173)

(Kita menginginkan sebuah revolusi yang damai... dengan cara seperti itu masyarakat bisa muncul sebagai keharusan dari perkembangan spontan dan alamiah, sementara revolusi hanya mencabut tatanan lama dan membentuk tatanan baru yang berasal dari tatanan lama...)

Meskipun Anarkisme sering kali dikaitkan dengan Proudhon dengan karyanya yang terbit tahun 1940 dengan judul *“Qu’est-ce que le Propriété, ou Recherches sur le principe du droit et du Gouvernement”* (Apa itu Properti [hak milik], Jawabnya adalah pencurian!), akan tetapi menurut Plekanov ia tidak layak disebut sebagai Bapak Anarkisme karena ia “hanya menjelaskan” sangat sedikit mengenainya disini; ia hanya mengabdikan beberapa halaman untuk itu” (Plekanov, 2006: 19). Proudhon sendiri baru menjelaskan tentang anarkisme secara detail tahun 1948. Pekerjaan mengenai penjelasan Anarkisme

sesungguhnya dimulai oleh Caspar Schmidt atau yang lebih dikenal dengan Max Striner (1845) dalam *Der Einzige und sein Eigentum* atau *The Ego and Its Own*.

Kalau kita telaah lebih lanjut lagi mengenai perkembangan pemikiran dan gerakannya, Anarkisme sudah lama sekali berkembang dan pemikiran tersebut masih berkembang hingga saat ini dengan nama, gaya dan bentuk yang berbeda-beda. Meskipun sudah lama berkembang, misalnya William Godwin (1756-1836) telah melontarkan gagasan yang diduga menjadi inspirasi paham Kooperasi sosialis model Owen, namun membahas paham anarkisme tidak dapat melupakan begitu saja tokoh pemikir Proudhon yang pada dasarnya mengadopsi gagasan koperasi sosialis, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Dia melihat bahkan kekuasaan negara dan kekuasaan modal adalah sinonim, sehingga mustahil baginya menggunakan negara untuk memperjuangkan kaum proletar. Belakangan Bakunin melanjutkan gagasan tersebut, bedanya Bakunin menempuh jalan pengambil alihan secara revolusioner dan kekerasan untuk membangun kolektivisme. Peter Kropotkin salah seorang pengikutnya Bakunin melanjutkan gagasan tersebut secara lebih komunistik, yakni dengan menganjurkan gagasan “segala sesuatu milik setiap orang, dan pembagian didasarkan pada kebutuhan tertentu masing-masing”.

Perkembangan praktek anarkisme selanjutnya mengarah pada pergerakan para buruh. Merekapun mulai mengadopsinya yang akhirnya melahirkan suatu sempalan baru yang dikenal dengan “*Anarcho-Syndicalism*”, atau *Revolutionary Syndicalism*. Berangkat dari asumsi bahwa fungsi serikat buruh yang secara

tradisional memperjuangkan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja dianggap sudah lagi tidak memadai. Serikat buruh harus menjadi organisasi militan untuk menghancurkan Kapitalisme dan negara. Buruh harus mengambil alih pabrik-pabrik dan dikuasai oleh bersama nantinya. Dengan demikian, serikat buruh juga dituntut mampu untuk menjadi pengelola manajemen pada saat pasca revolusi.

Pendek kata bagi mereka serikat buruh pada dasarnya berfungsi sebagai badan perlawanan, namun pada era pasca revolusi serikat buruh harus juga berfungsi dalam administrasi manajemen untuk mengelola industri. Untuk menjaga stamina militansi, suasana lingkungan perlu secara terus menerus dikembangkan untuk itu, mereka para anarki sindikalis dimasa lalu sangat percaya bahwa suatu aksi perlawanan yang massif akan mampu melumpuhkan negara dan bahkan sistim kapitalisme.

Apa yang penulis pahami mengenai dua teoritis awal dari Anarkisme yaitu Proudhon dan Striner, adalah analisis keduanya berangkat dari permasalahan antara Matrialisme dengan Idealisme, lalu kemudian beranjak pada konsepsi eksistensi Negara dan umumnya berakhir pada *relasi produksi*. Stirner berangkat pada konsepsi Matrialisme dari Feurbach, sedangkan Proudhon berangkat dari konsepsi Filsafat Transedental dari Kantian. Mereka berdua adalah pencetus awal Anarkisme secara ideologi. Lebih jauh lagi mengenai kedua tokoh ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dari karya tulis ini.

Anarkisme tidaklah bisa lepas dari tradisi kaum liberal, pada prinsipnya anarkisme memiliki sudut pandang yang tidak mudah untuk dipahami. Karena

“pertama ia akan lebih condong pada individualisme psikologis kaum liberal, tetapi ia akan condong lagi ke arah determinis sosial kaum liberasionis, jika persoalannya menyangkut tindakan praktis yang mendesak” (O’neil, 2001: 482).

Akan tetapi jika hendak dibuat sederhana setidaknya ada dua perbedaan pandangan yang mendasar antara kaum anarkis dengan kaum liberal itu sendiri yaitu;

1. Bagi kaum anarkis, individu adalah *secara deskriptif* berada di bawah masyarakat (dalam arti psikologis atau development) karena individu ditentukan, pada intinya, oleh keanggotaan sosialnya. Di sisi lain, individu *secara deskriptif* lebih tinggi kedudukannya (superior) ketimbang masyarakat (dalam arti filosofi murni), dan ia menjadi benar-benar manusia serta mencapai perwujudan diri hanya ketika ia melampaui perintah-perintah atau keharusan-keharusan (imperatif) masyarakat terorganisir itu sendiri secara menyeluruh (O’neil, 2001: 482)

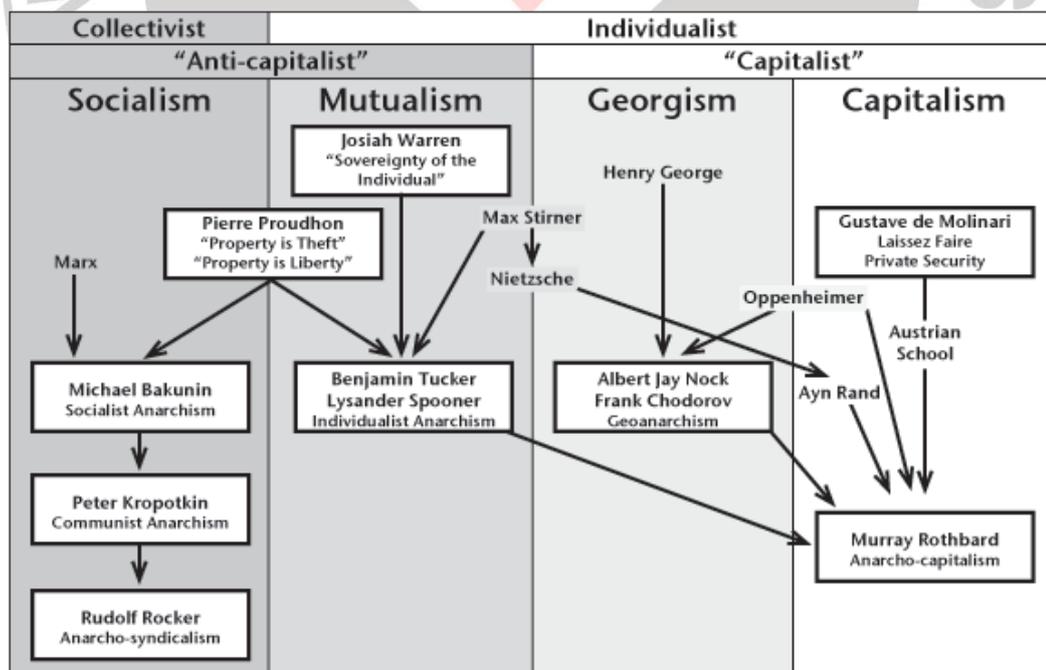
2. Masyarakat (dan kebudayaan) sama-sama diperlukan dan baik. Namun *negara*, yang mencaplok dan membawa individu pada organisasi-organisasi pra-penentu serta lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melestarikan sebuah corak perilaku tertentu melalui jangka waktu yang tak terbatas, mustinya tidak disamakan dengan *masyarakat*, ...jadi dalam artian tertentu, negara bersifat amoral, karena ia membawahkan pengalaman individual sedangkan yang ditinggikan adalah proses kolektif impersonal yang menderap sebagian besar bentuk keputusan moral (personal) seluruhnya. Subjektifitas lenyap ditelan mekanisme objektif yang besar dari organisasi politik. (O’neil, 2001: 483-484).

2. Varian Anarkisme

Kelompok-kelompok anarkis mungkin berbagi ide yang sama. Tapi biasanya mereka akan menemukan masalah mengenai keseluruhan struktur gagasan yang mereka yakini, yang akhirnya hal mengenai struktur gagasan dan metode yang diambil dalam pergerakan inilah yang membagi mereka menjadi banyak varian anarkis.

Anarkisme dalam pengertian secara taktis ia tidak bisa berdiri sendiri, anarkisme -terutama setelah Internationale pertama, selalu mencantumkan jenis varian metode atau ideologi lain dibelakangnya, semisal Anarko-Komunis atau sering disebut juga Komunis Libertarian. Anarko Komunis adalah bermakna jika varian ini menggunakan prinsip-prinsip komunis dalam struktur analisis ataupun taktisnya, atau contoh lain adalah Anarkisme-Kristen dari Leo Tolstoy yang menggunakan analisis Kristen sebagai tujuan yang diharapkan, atau contoh anarkis yang paling populer adalah Anarko-Sindikalis yang merupakan perpaduan antara Sosialisme Ilmiahnya Marx dengan Anarkisme Bakunin yang kemudian disebut sebagai Anarkisme-Kolektif.

Di bawah ini adalah diagram yang penulis dapatkan dan menurut penulis dapat memudahkan untuk memahami bagaimana “pohon” anarkisme itu muncul.



Maka untuk lebih memperjelas perbedaan yang ada didalam tubuh anarkisme, dibawah ini penulis mencoba memaparkan beberapa varian dari anarkisme yang dianggap oleh penulis sebagai yang populer dan paling banyak pengikutnya. Ketidak-turut sertaan dicantumkannya beberapa varian lain bukan berarti penulis mendeskreditkan capaian-capaian yang telah ada, melainkan ini didasarkan pada keefektifitasan dalam menulis karya ini. dan ini juga dipengaruhi oleh sedikitnya pengaruh beberapa varian yang tak tercantumkan dalam pergerakan anti kapitalisme dunia.

2.1. Anarko-Kolektif

Kelompok ini adalah sempalan dari Internationale pertama. Diprakarsai oleh seorang anarkis dari Rusia yaitu Mikail Bakunin (1814-1876). Dua karya besar dari Bakunin mengenai pandangan Anarkismenya adalah *God and State* (1871), dan *Statism and Anarchy* (1873).

Adanya perbedaan pandangan mendasar mengenai eksistensi negara pada saat Internationale pertama mengakibatkan Bakunin mengalami konflik dengan Marx. Kemudian oleh dewan Internationale Bakunin dan seksi Anarkisnya dikeluarkan karena dianggap membahayakan gerakan buruh dengan ide-ide borjuisnya. Setelah dikeluarkan dari Internationale, Bakunin dan beberapa fraksi anarkis lainnya tidak diam saja mereka kemudian membentuk sendiri pertemuan di St. Reimer tahun 1872. Namun sebelum itu pada kongres Liga Perdamaian dan Kebebasan di Berne tahun 1869, Bakunin menyerukan dua doktrin utama

kolektifisme yaitu “agar mendeklarasikan menyetujui “kesetaraan ekonomi dan sosial dari kelas-kelas dan individu-individu”” (Plekanov, 2006: 52).

Doktrin utama dari anarkis-kolektif adalah "*penghapusan segala bentuk negara*" dan "*penghapusan hak milik pribadi dalam pengertian proses produksi*".

Doktrin pertama merupakan terminologi umum anarkisme, tetapi kemudian diberikan penekanan pada istilah "*kolektif*" oleh Bakunin sebagai perbedaan terhadap ide negara sosialis yang dihubungkan dengan kaum Marxis / Komunis,

“Aku bukan seorang Komunis, karena Komunis memusatkan dan menyebabkan semua tenaga masyarakat diserap oleh Negara, sedangkan aku menghasratkan penghapusan Negara- pelenyapan radikal dari azas mengenai otoritas ini dan perwalian Negara, yang, dengan dalih moral dan memperadab manusia, hingga kini telah memperbudak, menindas dan mengeksploitasi dan menistakan mereka (Plekanov, 2006: 52)

dan Bakunin memperjelasnya lagi dengan pernyataannya sebagai berikut;

“Menghasratkan penghapusan negara, aku menghasratkan penghapusan pewarisan kepemilikan individual, yang tidak lain daripada suatu kelembagaan Negara. Dalam hal pengertian inilah, tuan-tuan, aku adalah seorang kolektivis dan bukan sama sekali bukan seorang komunis (Plekanov, 2006: 52-53).

Sedangkan pada doktrin kedua, anarkis-kolektif mengutamakan penghapusan adanya segala bentuk hak milik yang berhubungan dengan proses produksi dan menolak hak milik secara kolektif yang dikontrol oleh kelompok tertentu. Menurut mereka, pekerja seharusnya dibayar berdasarkan jumlah waktu yang mereka kontribusikan dalam suatu proses produksi dan bukan "*menurut apa yang mereka inginkan*".

Dan untuk pengertian yang kedua mengenai prinsip ekonomi kolektifisme Bakunin menerangkan jika;

“Aku menghasratkan pengorganisasian masyarakat dan pemilikan kolektif atau sosial dari bawah ke atas, lewat asosiasi bebas dan tidak dari atas ke bawah lewat sesuatu jenis otoritas” (Plekanov, 2006: 52).

Akan tetapi dikemudian hari label "*kolektif*" sendiri kemudian secara umum lebih sering diasosiasikan terhadap konsepsi dari Marx tentang negara sosialis.

Pada tahun 1880-an, kebanyakan dari para pendukung anarko-sindikalisme kemudian mengadopsi pemikiran –jika tidak ingin disebut sebagai pindah aliran-anarkisme-komunis, suatu varian anarkisme yang tumbuh di Italia setelah kematian Bakunin, dan kemudian dipopulerkan kembali oleh seorang pangeran dari Rusia yang bernama Peter Kropotkin.

2.2. Anarko-Komunis

Adalah William Godwin (1756-1836) yang dianggap sebagai peletak awal konsep Anarkisme-Komunis. Bagi Godwin sebab-sebab *penyakit* sosial dari masyarakat itu bukan dalam bentuk formulasi negara atau jenis dan sistem pemerintahan setempat, melainkan dikarenakan adanya negara itu sendiri. Negara hanyalah merupakan karikatur masyarakat, dan manusia yang ada dalam cengkraman negara itu sendiri hanyalah merupakan karikatur diri mereka, karena manusia-manusia ini secara tidak sadar dikerahkan untuk membuat penyekat ekspresi alami mereka dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak akhlaknya. Ide Godwin mengenai masyarakat tanpa negara mengasumsikan hak sosial untuk semua kekayaan alam dan sosial, dan kegiatan ekonomi yang

dijalankan berdasarkan sebuah prinsip *ko-operasi bebas* di antara produsen-produsen.

Namun demikian, kelompok anarkisme-komunis dalam artian taktis pertama kali diformulasikan oleh beberapa orang Italia yang terdiri dari Carlo Cafiero, Errico Malatesta dan Andrea Costa yang datang pada Internasionale I sebagai wakil dari kelompok federasi Italia. Pada awalnya kelompok ini (kemudian diikuti oleh anarkis yang lain setelah kematian Bakunin seperti Alexander Berkman, Emma Goldman, dan Peter Kropotkin) bergabung dengan Bakunin menentang kelompok Marxis dalam Internasionale I.

Berbeda dengan anarkisme-kolektif yang masih mempertahankan upah buruh berdasarkan kontribusi mereka terhadap produksi, anarkisme-komunis memandang bahwa setiap individu seharusnya bebas memperoleh bagian dari suatu hak milik dalam proses produksi berdasarkan kebutuhan mereka (http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchist_communism, 29-07-2011).

Kelompok anarkisme-komunis menekankan pada prinsip egalitarian (persamaan), penghapusan hirarki sosial (*social hierarchy*), penghapusan perbedaan kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, penghilangan kapitalisme, serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Negara dan hak milik pribadi adalah hal-hal yang tidak seharusnya eksis dalam anarkisme-komunis. Setiap orang dan kelompok berhak dan bebas untuk berkontribusi pada produksi dan juga untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan pilihannya sendiri.

Satu prinsip yang sering dipegang oleh kaum Anarkis-komunis adalah prinsip *mutual aid* (*simbiosis mutualisme*). Prinsip ini didasarkan pada sebuah

konsep dari Proudhon sebagai pengganti *relasi produksi* yang ada pada prinsip-prinsip anarkisme untuk menggantikan prinsip *relasi produksi* kapitalisme.

Teori mutualisme, adalah sintesis dari gagasan kepemilikan pribadi dan kepemilikan kolektif. Penjelasan yang mudah mengenai prinsip ini dapat ditemukan dalam *Declaration of the Rights and Duties of Man and of Citizen*, seperti yang dikutip pada Mulyana:

Do not do unto others as you would not have them do unto you. Always do unto others as you would they should unto you.

(Jangan lakukan [hal] pada orang lain sebagaimana kamu tidak menginginkan [hal yang sama] orang lain lakukan padamu. Selalu lakukan [hal] pada orang lain sebagaimana kamu ingin [hal yang sama] yang dilakukan orang lain pada mu)

Dalam pandangan ini manusia mewarisi hak-haknya dari kebajikan sifat dasarnya. Maka dengan cara yang sama, ia akan mendapatkan kesejahteraan secara langsung dari hasil kerja dan produk yang ia buat berdasarkan keterampilannya. Lebih spesifik lagi menurut mereka peraturannya adalah layanan untuk layanan, produk untuk produk, jasa untuk jasa, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan prinsip kuno jika mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Kesemua ini kemudian dibalik menuju prinsip-prinsip ekonomi dalam satu konteks yaitu kepentingan bersama, kebaikan layanan, dan persaudaraan bebas. Hukum itu kemudian tergantung pada institusi-institusi bersama semisal: asuransi bersama (*mutual insurance*), kredit bersama (*mutual kredit*), bantuan bersama (*mutual aid*), dan seterusnya. Dengan institusi-institusi seperti itu Proudhon (1865: 125) yakin jika masyarakat tidak akan membutuhkan kekuatan polisi, pendindasan, ataupun pembatasan dan tidak akan menyebabkan adanya ketidak puasaan dari siapapun.

Pada akhirnya, teori mutualisme, atau hukum pertukaran (*law of exchange*), dalam pandangan Proudhon (1846: 410-411), adalah sebuah sistem jaminan yang mampu memecahkan bentuk alama masyarakat sipil berbasis komersial dan memuaskan dalam segala kondisi efisiensi, kemajuan dan keadilan yang ditunjukkan oleh para kritikus. Melalui sebuah teori mutualisme masyarakat akan tersusun bukan berdasarkan konvensi, melainkan kenyataan (*reality*); sebuah masyarakat yang merubah spesialisasi (*division of labour*) menjadi sebuah instrument ilmiah; sebuah masyarakat yang menghentikan perbudakan manusia oleh mesin. Dan teori mutualisme akan mengubah kompetisi menguntungkan dan merubah monopoli menjadi jaminan keamanan bagi semua orang.

2.3. Anarko-Sindikalis

Salah satu aliran yang berkembang subur dan populer di dalam lingkungan anarkisme hingga hari ini adalah kelompok anarko-sindikalisme. Tokoh yang terkenal dalam kelompok anarko-sindikalis adalah Rudolf Rocker (1873-1958), karena dialah yang dianggap sebagai peletak dasar dan yang memberikan penjelasan mengenai ide dasar dari pergerakan ini, apa tujuannya, dan kenapa pergerakan ini sangat penting bagi buruh yang ia jelaskan pada sebuah pamflet yang ditulisnya yang berjudul *Anarcho-syndicalism* pada tahun 1938. Pada awalnya, Bakunin juga adalah salah satu tokoh dalam anarkisme yang gerakan-gerakan buruhnya dapat disamakan dengan orientasi kelompok anarko-

sindikalisme, tetapi Bakunin kemudian lebih condong pada anarkisme-kolektif terutama setelah kongres di Bern tahun 1869.

Anarko-sindikalisme adalah salah satu cabang anarkisme yang lebih menekankan pada pergerakan buruh. Sindikalisme sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berarti "*trade unionism*" atau "persatuan pedagang". Kelompok ini berpandangan bahwa serikat-serikat buruh (*labor unions*) mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mewujudkan suatu perubahan sosial secara revolusioner, mengganti kapitalisme serta menghapuskan negara dan diganti dengan masyarakat demokratis yang dikendalikan oleh para pekerja. Anarko-sindikalisme juga menolak sistem gaji dan hak milik dalam pengertian produksi. Dari ciri-ciri yang telah dikemukakan, pada prinsipnya anarko-sindikalis tidak memiliki perbedaan dengan kelompok-kelompok anarkisme yang lain. Akan tetapi terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang membedakan anarko-sindikalisme dengan kelompok lainnya dalam anarkisme yang sebenarnya hanyalah masalah taktis saja yaitu:

1. Solidaritas pekerja (*Workers Solidarity*)
- 2 Aksi langsung (*direct action*)
3. Manajemen-mandiri buruh (*Workers self-management*).

2.4. Anarkisme-Liberal

Anarkisme individualisme awalnya adalah merupakan salah satu tradisi filsafat dalam anarkisme yang menekankan pada persamaan kebebasan dan kebebasan individual. Konsep ini berasal dari paham liberalisme klasik. Kelompok individual-anarkisme percaya bahwa "*hati nurani individu seharusnya tidak boleh dibatasi oleh institusi atau badan-badan kolektif atau otoritas publik*".

Karena berasal dari tradisi liberalisme, individual-anarkisme sering disebut juga dengan nama anarkisme liberal.

Para pemikir yang dominan dalam individual-anarkisme antara lain adalah Max Stirner, Josiah Warren, Benjamin Tucker, John Henry Mackay, Fred Woodworth. Kebanyakan dari tokoh-tokoh anarkisme liberal berasal dari Amerika Serikat, yang memang menjadi basis liberalisme. Dan oleh karena itu pandangan mereka terhadap konsep anarkisme liberal kebanyakan dipengaruhi juga oleh alam pemikiran liberalisme yang berkembang disana.

Anarkisme liberal disebut juga sebagai "*anarkisme-egois*", karena salah satu pendukung teori ini yaitu Stiner -yang menulis buku *The Ego and Its Own*, lebih menonjolkan superioritas peran individu dan kebebasan individu dibanding kelompok atau masyarakat itu sendiri. Buku Stirner itu pada dasarnya adalah karya filsafat yang menganalisa ketergantungan manusia dengan apa yang dikenal sebagai '*kekuasaan yang lebih tinggi*' (higher powers). Dia tidak takut memakai kesimpulan- kesimpulan yang diambil dari hasil survei. Buku tersebut merupakan pemberontakan yang sadar dan sengaja yang tidak menunjukkan kehormatan kepada otoritas (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme>, 26-27-2011).

Bagi Stirner dan umumnya kaum anarkis “agama, hati nurani, moral, hak, hukum, keluarga, negara, kesemuanya itu hanya belenggu-belenggu yang dipaksakan” (Plekanov, 2004: 22). Lebih jauh lagi Stirner dalam upayanya menjelaskan anarkis melalui sudut pandangnya menjelaskan jika “Setiap Negara adalah suatu despotisme, entah itu despotisme dari seseorang atau dari orang banyak” (Plekanov, 2004: 22).

Sebenarnya masih banyak lagi varian-varian dari anarkisme semisal Anarkisme-Religius baik itu berlandaskan agama Islam, Kristen, Budha, ataupun Hindu, anarkisme Feminis, Anarkisme-Hijau atau *Eco-Anarchism*, atau bahkan belakangan muncul suatu fraksi lagi yaitu *Post-Anarchism* yang mengkritik sebagian teori-teori dasar anarkisme klasik dan mengkombinasikannya dengan neo-marxist. Akan tetapi meskipun banyak varian lain dalam anarkisme ini, penulis sengaja untuk tidak membahas lebih jauh lagi dikarenakan beberapa hal, yang diantaranya yaitu dikarenakan jika varian-varian lain itu selain tidak terlalu berperan aktif dalam gerakan Anarchist International dan juga memiliki jumlah pengikut yang tidak terlalu banyak dalam hitungan kuantitas, yang jika dalam artian kuantitas menuju kualitas, karena minimnya pengikut tersebut maka dampak atau pengaruh yang diberikan minim dalam perubahan sosial.

Kritikan-kritikan dari kaum anarkis memang tajam dan lihai dalam membahas kesalahan-kesalahan dari teori dan praktek ideologi lain serta peranan negara. Akan tetapi anarkisme ini bukanlah teori yang sempurna karena selain ia rapuh dalam landasan teori taktis, ia juga dianggap terlalu utopis dan sulit dipahami dengan menganggap individu dapat hidup dengan “adil” dalam masyarakat atau komunitas, tanpa sama sekali otoritas yang mengawasi dan atau menjaga agar tidak terjadi penyelewengan dari anggota masyarakat itu sendiri.

3. Posmodernisme

Postmodernisme adalah suatu konsepsi yang lahir dari Mazhab Frankfrut, Jerman. Berawal dari konsepsi kritis atas seni arsitektur kemudian ia berkembang menuju kritik dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya adalah pendidikan.

Bermula pada awal 1960-an ketika Komunisme mulai usang dan Kapitalisme mulai menjadi ideologi yang dominan di dunia, kemudian muncul perkembangan baru baik dalam dunia kebudayaan maupun dunia pemikiran sosial dan filsafat untuk membentuk suatu alternatif dari kedua hal tersebut, meskipun demikian kebanyakan dari pemikir yang beraliran posmo berasal dari kaum neo-marxis. Munculnya berbagai mode berpikir dan cara melihat realitas secara baru ini pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai kritik kultural maupun politis terhadap krisis kondisi modernitas yang telah melahirkan kecemasan, keterasingan, imperialisme, pembantaian (holocaust) dan perang.

Sejak kelahirannya, mode berpikir baru ini terus berkembang dan menjadi perbincangan serius di kalangan filsuf, budayawan, ilmuwan sosial, dan para politikus, baik dalam cara pandang maupun dalam sisi validitas konseptualnya. Hingga kini perdebatan mengenai aliran pemikiran ini telah mendatangkan banyak diskusi dan telah memproduksi ratusan literatur di segala bidang di bawah sebuah tema besar yang masih terus diperdebatkan yang kini disebut dengan: posmodernisme. Mereka yang terlibat dalam perbincangan fenomena baru ini di antaranya adalah Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jurgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Michel Foucault, Derrida, dan masih banyak lagi.

Jameson melihat posmodernisme sebagai totalitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan sejarah yang menandai gejala-gejala sosial mutakhir sejak 1950-an seiring dengan munculnya struktur masyarakat baru yang disebut dalam berbagai perbincangan akademis sebagai “masyarakat pos-industrial” (Daniel

Bell), atau “masyarakat konsumer”, “masyarakat media”, “masyarakat informasi”, “masyarakat elektronik”, dan lainnya (diunduh tanggal 18-11-2011 dari: <http://nurulhuda.wordpress.com/2006/11/24/jamesonposmodernismekapitalisme>)

Bagi Jameson semua teori tersebut sebenarnya hendak melukiskan sebuah formasi sosial baru yang berbeda dengan struktur sosial kapitalisme lama. Yakni suatu formasi sosial-budaya yang lebih merupakan produk logika budaya kapitalisme multinasional.

Posmodernisme juga melahirkan apa yang dikenal sebagai Teori Kritis. Teori Kritis merupakan salah satu perspektif teoritis yang bersumber pada berbagai pemikiran yang berbeda yang lebih merupakan sebuah sintesa dari para pemikir seperti Aristoteles, Foucault, Gadamer, Hegel, Marx, Kant, Wittgenstein dan berbagai pemikiran-pemikiran berbeda tersebut disatukan oleh sebuah orientasi atau semangat teoretis yang sama, yakni semangat untuk melakukan emansipasi.

Tujuan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan dan persamaan. Teori ini menggunakan metode reflektif dengan cara mengkritik secara terus menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik atau ekonomi yang ada, yang cenderung tidak kondusif bagi pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan.

Ciri khas Teori Kritis tidak lain ialah bahwa teori ini tidak sama dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Singkatnya, pendekatan teori ini tidak bersifat kontemplatif atau proses spekulatif murni. Pada sudut pandang tertentu, posmodernisme memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx, sebagai teori yang menjadi emansipatoris. Selain itu, tidak hanya mau menjelaskan,

mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial tapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah dunia yang sedang berkembang hari ini.

Pada dasarnya, esensi dari Teori Kritis adalah bentuk dari konstruktivisme, yaitu memahami keberadaan struktur-struktur sosial dan politik sebagai bagian atau produk dari intersubektivitas dan pengetahuan secara alamiah memiliki karakter politis, terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. politis pengetahuan ini berkembang dari atau dipengaruhi oleh tiga pemikiran yang berbeda, yaitu:

1. Pertama, pemikiran Kant mengenai keterbatasan pengetahuan, yaitu bahwa manusia tidak dapat memahami dunia secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja (parsial).^[8]
2. Kedua, pemikiran Hegel dan Marx bahwa teori dan pembentukan teori tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ilmuwan harus melakukan refleksi terhadap teori atau proses pembentukan teori tersebut.^[9]
3. Ketiga, pemikiran Horkheimer yang membedakan teori ke dalam dua kategori, yakni tradisional dan kritis. Teori tradisional menganggap adanya pemisahan antara teoretisi dan obyek kajiannya. Artinya, teori tradisional berangkat dari asumsi mengenai keberadaan realitas yang berada di luar pengamat, sementara teori kritis menolak asumsi pemisahan antara subyek-obyek dan berargumen bahwa teori selalu memiliki dan melayani tujuan atau fungsi tertentu.

Perlunya mencantumkan analisis posmo disini adalah untuk mempertegas pendirian Ivan Illich sebagai seorang anarkis bukan seorang neo-marxis atau seorang posmo. Illich dengat tegas beberapa kali menolak struktur yang bersifat mekanis dan mendorong agar masyarakat membentuk sebuah organisasi sosial yang organis (terjadi dengan sendirinya), baik itu dalam struktur negara/pemerintahan sedangkan posmo meskipun ia mendekonstruksi sistem sosial atau sistem pendidikan ia masih mengacu pada struktur yang bersifat mekanis (yang dibuat dan diprogram dengan sengaja). Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan pada BAB IV dalam karya tulis ini.

4. Anarkisme Pendidikan

Budaya dari anarkisme pendidikan sendiri tidaklah lepas dari tradisi kaum liberal. Jika mengambil rentang garis dari kiri ke kanan, maka anarkisme ada pada ujung yang paling kiri dari garis liberal, dalam ujung ini terdapat kelompok anarkis yang memiliki jiwa sosialis yang juga termasuk di dalamnya adalah kaum Anarkis Pendidikan, hal ini disebabkan meskipun kaum anarkis membela kebebasan individu namun pada akhir kesimpulannya orang-orang ini masih mempercayakan masyarakat sebagai hal yang utama. Sedangkan di ujung paling kanan ada kaum anarkis individualis/kapitalis, dipelopori oleh novelis Ayn Rand, mereka yang berada diujung yang paling kanan ini sangat mempercayai jika setiap individu bebas dan berhak untuk memiliki segala aset alam, dan tidak ada satupun pihak yang menghalang-halangi proses itu. Akan tetapi seperti yang diungkapkan oleh O'Neil (2004: 347), penjelasan yang ditulis oleh penulis diatas hanya berlaku bagi kaum liberal yang non-keagamaan saja.

Anarkisme Pendidikan ialah sebuah konsep ideologi pendidikan yang menganggap bahwa individu yang tergabung dalam kelompok atau masyarakat untuk menekan kebutuhan dan meminimalkan dan atau menghapuskan batasan-batasan kelembagaan yang dikenakan terhadap perilaku personal, dan sejauh mungkin menjadikan masyarakat tak terlembagakan (mendesintusionallisasikan masyarakat) (O'neil, 2004: 583).

Mengikuti pembagian yang dilakukan oleh O'Neil (2004) maka pada prinsipnya Anarkisme pendidikan ini adalah sebuah bagian dari ideologi pendidikan, ini juga merangkum kesemua teori dari anarkisme pendidikan,

meskipun ada perbedaan mendasar diantaranya, namun jika dilihat dari argumen yang dibangun oleh O'Neil perbedaan tersebut bukanlah suatu hal yang pokok untuk dipersebatkan lebih lanjut. Selain dipandang sulit untuk membedakan ketiga corak anarkisme pendidikan tersebut, lainnya juga adalah jika perbedaan ini sejatinya tidak merubah struktur kritikan analisis kaum anarkisme pendidikan.

Anarkisme Pendidikan ini sendiri timbul sebagai respon terhadap dunia pendidikan formal yang berlaku pada sistem sosial masyarakat modern. Masyarakat modern telah menjadi begitu instan dalam segala hal, termasuk dalam menjadi pintar. Pendidikan kini hanya mengejar nilai-nilai yang tercantum dalam rapor atau ijazah saja, dan bahkan pendidikan kini telah menjadi bisnis yang paling menguntungkan setelah bisnis kesehatan. Masyarakat modern ini telah terprovokasi oleh lembaga pendidikan formal dalam hal mitos mengkonsumsi ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan dan keseharian kita, sekolah ini telah menjadi lembaga yang mereproduksi ide-ide budaya dominan, bahkan menurut Michael W. Apple (2004), sistem pendidikan formal -yang didalamnya terkandung sebuah kurikulum rahasia adalah merupakan suatu sumber konflik.

Berdasarkan pengertian berdasarkan konsep pendidikan dalam sudut pandang intelektualisme maka tujuan didirikan sekolah itu adalah “untuk [dapat] mengenali, merumuskan, melestarikan dan menyalurkan Kebenaran (yakni pengetahuan tentang makna dan nilai penting kehidupan secara mendasar)” (O'Neil, 2004: 287).

Sekolah sendiri didirikan -mengambil prinsip intelektualisme pendidikan setidaknya atas dua alasan mendasar. *Pertama*, adalah untuk mengajar siswa

tentang bagaimana cara menalar (bagaimana cara berfikir secara jernih dan tertata). *Kedua*, adalah untuk menyalurkan kebijaksanaan yang tahan lama dari masa silam (O'Neil, 2004: 287). Sedangkan menurut Sir Ken Robinson dalam *changing education pardigm* (2010) berpendapat jika sekolah didirikan dan direformasi hanya dengan dua tujuan, pertama adalah untuk mendidik sebuah proses budaya, dan yang kedua adalah untuk bisnis. Kedua prinsip ini adalah dasar dari sistem pendidikan itu sendiri. Paduan fungsi-fungsi ini pulalah yang cenderung menjadikan sekolah suatu lembaga yang utuh, yaitu “...yang menjadikan sekolah suatu lembaga internasional, dan yang menyebabkannya merupakan alat yang sangat efektif untuk pengendalian sosial” (Reimer, 1987: 13).

Posisi seorang anak didik jika mengikuti arus pandangan dari kaum intelektualisme maka ia ada pada posisi seseorang yang akan belajar sebuah kebijaksanaan dan kebaikan, karena secara hakiki mereka adalah mahluk sosial dan rasional sekaligus secara bersamaan. Perbedaan secara individual tidak terlalu ditekankan, dalam paradigma pendidikan kaum intelektualis, kesamaan-kesamaan secara individual lebih ditonjolkan. Persamaan yang ada itu secara bertahap bersifat determinatif dalam memapankan program-program pendidikan yang layak. Mereka para anak didik ini pada dasarnya diberikan pilihan untuk menentukan nasib sendiri, yang dalam artian tradisional adalah memiliki kehendak bebas yang personal. Sedangkan kurikulum dalam pandangan kaum intelektualisme ini sendiri adalah ada pada fungsi penekanan disiplin

intelektualitas, melatih agar mereka mampu menalar secara jelas dan tertata (O'Neil, 2004: 288).

Pengelolaan pendidikan sendiri tidak bisa dilepaskan dengan kehadiran lembaga yang bernama sekolah, begitu menyatunya dengan kehidupan keseharian kita akhirnya bersekolah menjadi rutinitas yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Karena telah menyatunya lembaga yang bernama sekolah dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga membuat masyarakat kesulitan atau bingung untuk memahami premis jika “belajar tidak harus melalui sekolah”, dan semakin membenarkan premis Illich jika “sistem sekolah telah mengubah kebutuhan belajar menjadi keharusan bersekolah” (Illich, 1987: 7).

Dalam artikelnya Spring menyebutkan jika salah satu alasan yang penting dari penolakan kaum anarkis terhadap pendidikan formal dan segala sistem pendidikan nasional adalah jika “pendidikan ditangan negara akan menjadi pelayan kepentingan-kepentingan politis orang-orang yang berkuasa” (Naomi [ed], 2009: 501). Pada Bab IV nanti penulis akan menjelaskan keterkaitan lebih jauh mengenai hubungan antara pendidikan dengan kebijakan politis.

Bagi mereka dalam konteks ini persekolahan adalah merupakan suatu senjata pamungkas negara untuk membentuk dan mengarahkan kehendak serta karakter warganya hingga mereka akan mendukung serta melestarikan lembaga-lembaga yang sudah mapan (Naomi [ed], 2009: 501-502). Penjelasan yang lebih detail lagi dijelaskan oleh William Godwin, “pandangan-pandangan mereka sebagai para pelembaga pendidikan takan jauh dari pandangan-pandangan dalam kapasitas politis mereka” (Naomi [ed], 2009: 501-502). Hal ini mungkin sangat

erat dengan keadaan konsep pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh yang ada adalah pembahasan mengenai sejarah dan peranan Partai Komunis Indonesia dalam sejarah nasional kita. Hal ini dilakukan mungkin dalam rangka pembatasan penyebaran dan pelarangan ide-ide komunis, tanpa adanya upaya penilaian yang serius dan adil didalam kelas ketika proses pembelajaran ataupun pada kurikulum resmi yang berlaku.

Kita harus dapat membedakan antara *manusia bebas* dengan *manusia terdidik*, ujar Stirner.

“Manusia bebas menggunakan pengetahuan untuk memuluskan penentuan pilihan. Jika kita gugah gagasan tentang kebebasan dalam diri manusia... maka manusia bebas akan terus-menerus membebaskan dirinya sendiri; namun jika kita hanya mendidik manusia, ia akan selalu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan, dengan cara yang sangat elegan dan sangat terdidik, serta merosotlah ia menjadi jiwa membudak” (Naomi [ed], 2009: 506).

Pengetahuan, pendidikan dan sekolah itu tiga hal yang berbeda. Dalam perspektif anarkisme pendidikan pengetahuan adalah efek samping samping dari kehidupan kita sehari-harinya, kita belajar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang nyata dalam keseharian kita, maka disinilah fungsi pengetahuan itu berguna (Konsep ini dapat ditemukan baik dalam bukunya Illich (1971) ataupun Reimer (1974)).

Pengetahuan yang sejatinya merupakan hasil dari efek sampingan dari keseharian kita dapat digunakan secara efektif ia haruslah memiliki keterkaitan dengan masyarakat itu sendiri, setidaknya menurut O’Neil jika “*kenyataan* adalah sebuah *pengalaman personal*, namun *kepribadian/personalitas* pada puncaknya berakar di dalam keanggotaan sosial” (2004: 118). Maka dari itu agar suatu

pengetahuan itu lebih efektif dan bermakna baik bagi si pengguna dan masyarakat itu sendiri maka menurut kaum anarkisme pendidikan sebaiknya pengetahuan itu janganlah diajarkan melalui lembaga pendidikan formal semacam sekolah, karena proses penyerapan pengetahuan dalam lembaga pendidikan formal akan mengubah individu menjadi *pelajar* dan bukannya menjadi sosok pribadi yang tunduk membudak karena ia *diajari* untuk menggantungkan dirinya pada sumber-sumber otoritarian yang mengajarnya keyakinan-keyakinan dan tujuan tertentu, dan tidak sama sekali dibiarkan untuk menentukan secara mandiri untuk memilih tujuan itu.

Inipun sesungguhnya jalan dengan tradisi kaum liberal sendiri, tapi juga merupakan semacam campuran antara *Empirisme* dan *Behaviorisme Filosofis*. Empirisme karena mereka yakin jika pengetahuan hanyalah sebagai dampak dari pengalaman personal, Behaviorisme karena mereka percaya pengalaman yang dikeluarkan adalah berdasarkan perilaku timbal-balik antara makhluk dengan lingkungan materinya (lingkungan dan sosial). Meskipun begitu keseluruhan pengetahuan yang diperoleh bersifat relatif, dan sangat tergantung pada sifat jakiki dan muatan pengalaman personal dengan mana pengetahuan itu dikuatkan atau yang dinamakan dengan *Relatif Psikologis* (O'Neil; 2004: 347-350). Dikarenakan keseluruhan pengetahuan personal adalah pengalaman personal yang sifatnya relatif, dan kemudian pengalaman itu *tersubjetifikasi* yang semakin lama-semakin terorganisasi berdasarkan sistem diri atas respon materi disekitarnya, maka dapat disimpulkan jika individu ini *bukanlah menanggapi dunia*, melainkan menanggapi *tanggapan-tanggapannya sendiri terhadap dunia*, di mana

tanggapan-tanggapannya itu pada dasarnya akan *diperantai oleh kepribadiannya* (personalitasnya), dan kepribadiannya itu teruma sekali akan sejalan dengan perkembangan *jati diri personal*, selama tahun-tahun pertama dari kehidupannya, maka dari itu juga ia akan bersifat *Developmentalisme Psikologis* atau *Psikologi Perkembangan* (O'Neil, 2004: 350).

Sejalan dengan itu semua, para pemikir anarkisme pendidikan berasumsi jika pendekatan terbaik secara taktis terhadap pendidikan adalah mengusahakan untuk melakukan perubahan-perubahan dengan secepat mungkin, dalam skala besar di dalam masyarakat. Diantaranya adalah dengan cara menghilangkan sistem persekolahan modern yang ada sekarang, yang untuk kemudian diharapkan akan tercipta sebuah masyarakat yang terdesentralisasikan, terinstitutionalkan, dan individu-individu itu akan kembali pada fitrahnya sebagai makhluk yang bebas. Harapannya adalah orang-orang akan kembali pada diri mereka sendiri, kepada seluruh dunia yang disederhanakan secara radikal yang terdiri atas hubungan-hubungan 'Aku-Engkau' (*I-Thou*) yang berlandaskan pada kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih sedikit, semangat hidup/vitalitas yang jauh lebih besar, rasionalitas yang meningkat, serta jenis moralitas sejati yang berdasarkan tanggung-jawab personal yang tercerahkan (O'Neil, 2004: 583).

Penghapusan sekolah-sekolah ini bagi kaum anarkisme pendidikan bukan hanya merupakan suatu cara yang dapat mengefektifkan pembaharuan dalam masyarakat atau sekedar perombakan yang bersifat tentatif yang perlu diadakan dilingkungan sekitar, melainkan juga menjadi salah satu kunci bagi pembaharuan sistem sosial masyarakat yang baru.

Lalu muncul pertanyaan bagaimana untuk mencapai pembaharuan itu?

Menurut penulis disinilah Reimer berjasa mengenai penjelasan menuju jalan pembaharuan itu., yaitu menuju sebuah Revolusi Damai.

Bagi Reimer,

“kontradiksi pokok dalam sistem sekolah sudahlah menjadi rahasia umum: bahwa sekolah terlalu mahal untuk menjadi suatu sistem pendidikan universal; bahwa sekolah melestarikan ketidakmerataan; bahwa sekolah memancing perlawanan mayoritas besar terhadap pendidikan dengan memaksakan pengajaran yang tak mereka kehendaki; bahwa masyarakat yang terpelajar dibutuhkan terhadap kekeliruan mereka sendiri” (Reimer, 1987: 125-126).

Hanya masalahnya bagi Reimer adalah masyarakat belum mengetahui masalah kontradiksi yang hinggap dipersekolahan, yang akibatnya adalah mereka belum cukup kecewa terhadap sistem itu, sehingga enggan pula untuk merubahnya. Maka dari itu Reimer mengeluarkan “saran-saran tentang perlu adanya program-program hukum, perpajakan, lembaga-lembaga dan pendidikan akan sangat mudah terlaksana” (Reimer, 1987: 126), dan menurut keyakinan Reimer, tentunya akan mempercepat penyebarluasan kekecewaan itu sendiri yang akhirnya nanti akan mendorong sebuah revolusi sosial secara organis dan berdasarkan prinsip-prinsip swakelola.

Dalam programnya, Reimer mendorong agar perlunya perundangan yang memiliki dua segi. “yang pertama terdiri dari tindakan menurut hukum yang ada, dan kedua terdiri dari saran-saran untuk menyusun perundangan baru” (Reimer, 1987: 126), yang berarti ini adalah melalui parlementariat, dan mendorong legislatif mendukung ide ini. hal ini berdasarkan asumsi jika “sekolah sepenuhnya merupakan alat negara, dan menimbulkan ketaatan pada negara” (Reimer, 1987:

127). Komponen terpenting dalam jalan menuju revolusi pendidikan secara adalah pendidikan itu sendiri.

Para anarkis sangat percaya bahwa titik vital pendidikan haruslah terletak pada gagasan untuk mengembangkan pemikiran secara mandiri, bebas dari dogma, dan prasangka. Maka diharapkan pengetahuan yang didapat melalui pola ini akan menghasilkan kehendak yang bebas akan nasib dirinya sendiri.

Dalam kategorisasi penulis mengikuti pengelompokan yang dibuat oleh William O'Neil yang membagi Anarkisme pendidikan menjadi tiga varian pengelompokan besar yaitu: anarkisme taktis, anarkisme revolusioner, dan anarkisme utopis. Perbedaan yang mendasar dari ketiga corak itu adalah masalah "*niat, konsep yang tersirat, tetapi tidak secara tidak langsung dinyatakan*" (Oneil, 2001: 486-487).

Kaum anarkis taktis beranggapan jika hal yang paling mendidik yang bisa dilakukan adalah dengan penghapusan sekolah-sekolah yang menyediakan akses kekayaan yang selama ini dipakai untuk membiayai aparat persekolahan yang boros dan tidak produktif, dan kekayaan yang terbebaskan tadi dapat digunakan untuk memperbaharui kondisi sosial di dalam sistem yang sudah ada. Sehingga kita dapat membuka banyak kemungkinan-kemungkinan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan sejati (O'neil, 2001: 584).

Bagi kaum anarkis revolusioner, penghapusan sekolah-sekolah secara efektif diperlukan untuk membuat revolusi sosial yang dibutuhkan, lebih jauh lagi adalah untuk membela keadilan sosial dan mengakui bahwa "lembaga-lembaga pendidikan kita sendiri adalah agen-agen patologis yang mereproduksi sistem

yang ‘sakit’ (O’neil, 2001: 583), dan sejatinya sebuah revolusi itu adalah untuk mengancurkan “batu” penjuror dari bangunan sistem yang ada, hal ini diperlukan untuk membukakan era baru dalam sosialisme demokratis.

Sedangkan bagi kaum anarkis utopis, mereka menganggap bahwa persekolahan konvensional secara total bersifat kuno, usang, tak terpakai lagi. Bagi mereka masyarakat hari ini telah berdiri “di depan pintu” masyarakat utopis *post fordism* atau paska industri yang dicirikan oleh kemakmuran dan kesengangan bagi semua orang, ini adalah satu jenis masyarakat dimana hanya sejumlah kecil saja pekerja yang terlatih yang diperlukan untuk mempertahankan sistem produksi dan sisanya nyaris keseluruhan proses produksi dibuat secara otomatis dengan menggunakan mesin, dan disinilah sesungguhnya sisi utopis yang terdapat dalam varian anarkisme pendidikan ini.

Akan tetapi dari ketiga varian anarkis ini tetap memiliki satu prinsip yaitu berdasarkan kebutuhan timbal-balik dan swakelola dan didasari pada “individualisme kolektif” (O’neil, 2001: 487).

B. Perspektif Masyarakat Tanpa Sekolah Ivan Illich

Masyarakat tanpa sekolah adalah sebuah ide atau konsepsi mengenai pembebasan diri dan masyarakat terhadap ketergantungan pada lembaga-lembaga pendidikan formal. Awalnya ide mengenai masyarakat tanpa sekolah ini berlandaskan terhadap kritikan kaum anarkis terhadap eksistensi negara dan segala macam perangkatnya. Hingga akhirnya tahun 1971 terbit buku yang berjudul *Deschooling Society* dari Ivan Illich yang menurut banyak ahli pendidikan dianggap sebagai kritik terbaik dari kaum anarkis terhadap dunia pendidikan. Hal

ini juga mengingat jarang sekali buku-buku yang dikeluarkan oleh kaum anarkis yang spesifik mengenai pendidikan anarkis itu seperti apa dan bagaimana setelahnya, meskipun sebelumnya ada beberapa penulis semisal William Goodman atau Evert Reimer pasca terbitnya *Deschooling Society*..

Sekolah dengan beragam perangkat serta regulasi yang tersedia didalamnya, bagi Illich, dianggap tidak dapat membebaskan para anak didik, justru ini akan mengekang kebebasan mereka, dan belajar akhirnya hanya sekedar mengikuti aturan yang ada, dan menerima apa yang diajarkan oleh guru yang “kompetensi guru itu sendiri terbatas pada apa yang dapat dilakukan disekolah (Illich, 1984: 36). Akhirnya menghilangkan tujuan mulianya yaitu pembebasan dari ketertindasan baik itu politis ataupun ekonomis. Seharusnya menurut Illich “bahwa pendidikan untuk semua orang berarti pendidikan oleh semua orang. Bukan pengikutsertaan dalam suatu lembaga yang dispesialisasikan” (Illich, 1984: 36). “Adanya kewajiban bersekolah itu pada hakikatnya sudah membagi masyarakat manapun menjadi dua dunia: ada jangka waktu, proses, pelayanan dan profesi yang “akademis” atau “pedagogis”, sedangkan yang lainnya tidak” (Illich, 1984: 39).

Mitos mengenai bersekolah ini di manapun negaranya, entah itu negara fasis, demokratis, dan ataupun negara sosialis pada dasarnya sama (Illich, 1984: 100), sama-sama dianggap tidak dapat memberikan pembebasan yang diharapkan dari pendidikan itu sendiri. Sekolah melanggengkan budaya dominan dalam struktur masyarakat berdasarkan berbagai macam ritualisasi yang terdapat

didalamnya. Ritualisasi ini sendiri berdasarkan mitos-mitos yang sudah terlembaga dan terinternalisasi dalam sistem pendidikan formal.

Sistem pendidikan sendiri telah membuat seorang anak didik teralienasi dengan keseluruhan lingkungannya. Baik Freire ataupun Illich sepakat dalam ini. Freire (2009) misal dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Untuk Kaum Tertindas menggambarkan posisi ketertindasan ini ada pada struktur guru dan murid yang ia sebut sebagai “model pendidikan gaya bank”. Relasi yang dibangun oleh sistem pendidikan formal bagi Freire ini bukanlah sebuah relasi yang seimbangan, posisinya tidak membuat seorang anak adalah sebagai seorang yang akan belajar, melainkan lebih mirip pada seorang yang akan menerima indoktrinasi. Kelas telah dikondisikan sedemikian rupa dengan realitas, posisi murid yang berjajar rapih dan siap ‘belajar’ sedangkan guru yang berdiri didepan sebagai seorang figur super dan ‘maha tahu’ adalah sebuah posisi yang tidak seimbang.

Mitos persekolahan ini telah mendirikan sebuah mitos yang bagi banyak kaum anarkis sukar untuk diruntuhkan, bahkan menurut Thoureau dalam Naomi (2004), untuk memahami bagaimana cara sekolah bekerja dan memanipulasi anak kita harus berpisah terlebih dari sejarah dahulu, karena sekolah telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, begitu inherennya sekolah ini sehingga masyarakatpun akan kesulitan untuk berfikir melepaskan diri dari sistem pendidikan nasional.

Maka dari itu kaum anarkisme pendidikan sangatlah menginginkan sebuah proses transformasi sosial. Akan tetapi ternyata menurut Reimer (1987) sebuah

alternatif radikal bagi masyarakat ternyata sudah dibentuk oleh sistem persekolahan itu sendiri, meskipun sebenarnya ia memerlukan mekanisme formal baru untuk mencapai keterampilan secara formal serta penggunaannya untuk mendidik masyarakat, penekanannya pada dua hal, informal dan insidental seperti pendapat Illich. “masyarakat yang bebas dari sistem sekolah mencakup suatu pendekatan baru bagi pendidikan insidental atau informal” (Illich, 1984: 37). Informal adalah syarat untuk lepas dari formal. Penggunaan kata informal adalah merujuk pada penekanan hari ini yang membagi pendidikan menjadi tiga definisi yaitu formal, informal dan nonformal. Mungkin saja ada kata lain dikemudian hari yang dapat menunjukan atau menggantikan kata ini, akan tetapi hingga skripsi ini dibuat penulis sendiri belum mendapatkan satu definisi atau istilah yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Illich sendiri. Kemudian maksud dari insidental yang dikemukakan oleh Illich ini adalah bermakna jika pendidikan itu haruslah bersifat organis, terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan anak didik dan masyarakat sekitarnya, ia tidak dimaksudkan menjadi syarat untuk kerja seperti sekarang, akan tetapi untuk masuk pada semacam *self consumption* atau produksi dan konsumsi sendiri. Inipun didasarkan pada kebiasaan secara tradisional sifat-sifat kaum anarkis lainnya, terutama sekali merujuk pada pendapat Proudhon (1851) dan Peter Kropotkin (1919) mengenai sistem *mutual aid* dalam tubuh anarkisme.

Ternyata meskipun terlihat jelas terdapat kesalahan fatal dalam sistem pendidikan formal ternyata ada beberapa hambatan menuju masyarakat yang bisa mendidik dirinya sendiri itu, terutama sekali adalah dikarenakan “seluruh

imajinasi kita “sudah dibentuk oleh sistem sekolah”” (Illich, 1984: 38). Meskipun sebenarnya masyarakat kita hari ini dibentuk secara kolektif berdasarkan rancangan-rancangan secara sadar. Namun keseluruhan rancangan sadar itu ternyata ada semacam efek samping, karena kesadaran itu akhirnya menjadikan dunia dalam dua bentuk sudut pandang, Illich sendiri mengutip pernyataan Emile Durkheim mengenai hal ini’

“Ia berpendapat bahwa ada agama yang tak mengenal hal yang adikodrati, dan ada pula agama tanpa dewata. Tetapi tidak ada satu agama pun yang tidak membagi dunia ini dalam benda, saat serta pribadi yang suci (*sacred*) pada satu pihak, dan benda, saat serta pribadi lainnya yang tidak suci (*profane*) pada lain pihak (Illich, 1984: 39).

Menurut Illich, pandangan Durkheim ini dapat diterapkan juga pada sosiologi pendidikan, “karena sekolah itu sendiri secara radikal membagi kenyataan dalam dua dunia dengan cara yang sama” (Illich, 1984: 39).

Dalam Illich kita akan menemukan sebuah konsep yaitu *alienasi baru*. Alienasi ini terjadi disebabkan oleh semacam relasi produksi yang terbentuk dalam proses reproduksi budaya dalam sistem pendidikan formal. Mengenai alienasi sendiri biasanya ia merujuk pada konsepsi dari Karl Marx, yang merujuk pada sebab-akibat dari hubungan produksi yang terjadi dalam pandangan determinan ekonomi-politik. Illich mengambil konsepsi ini juga, ia melihat jika sekolah telah menjadi semacam pabrik modern. Asumsi yang dibangunnya adalah ketika ia melihat kenyataan jika seorang anak hanya melakukan ritual seperti masuk sekolah (input) kemudian bersekolah (proses produksi) dan lulus (output). Jelasnya menurut Illich dalam arti tradisional *alienasi* adalah “merupakan akibat langsung dari kenyataan sejarah bahwa kerja untuk menciptakan (*create*) dan

menciptakan kembali (*recreate*)” (Illich, 1984: 65). Proses semacam itu akan menjadikan anak terasing dengan dunia luar/realitas. Terasing dari ilmu yang ia pelajarinya sendiri dikarenakan ilmu yang ia dapatkan di sekolah hanya menjadi syarat untuk lulus, jarang digunakan untuk realisasi diri. Sistem sekolah formal telah menjadi sebuah kurikulum tersembunyi yang membentuk anak sedemikian rupa hingga kehilangan “proses menjadi manusia” yang sesungguhnya, “dibuat terpisah atau tidak layak, dijauhkan atau dasingkan hubungannya dengan [realitas] yang lain” (Woodfin, 2008: 61).

Lantas kenapa sekolah dikaitkan dengan sebuah konsep ekonomi?

Hal ini dikarenakan sekolah telah menciptakan sebuah “mitos konsumsi tanpa batas” (Saksono, 2004: 35). Hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia akan pengetahuan -yang telah menjadi komoditas, “dan di sekolahlah kita diajar bahwa pengetahuan yang bermutu itu adalah hasil dari hadirnya anak dikelas” (Saksono, 2004: 35).

“Mitos modern ini didasarkan pada keyakinan bahwa proses itu senantiasa menghasilkan sesuatu yang berharga, dan oleh sebab itu, produksi pastilah menghasilkan permintaan. Sekolah mengajarkan kepada kita bahwa pengajaran itu menghasilkan pengetahuan.Begitu kita merasa membutuhkan sekolah, segala tindakan kita cenderung mengambil bentuk hubungan-hubungan klien dengan lembaga spesialisasi lainnya” (Saksono, 2004: 35).

“Sekolah menjadikan alienasi semacam persiapan hidup, dan dengan demikian pendidikan tidak lahgi senyawa dengan realita, dan kerja tidak lagi senyawa dengan kreativitas” (Illich, 1984: 65), maka itulah yang dinamakan oleh Illich sebagai *alienasi baru*. Selanjutnya sekolah kini telah mempersiapkan pelembagaan hidup yang membuat orang terasing dengan mengajari kebutuhan

seseorang untuk diberi pendidikan. Kalau kita telah menerima konsepsi ini, maka kita tidak lagi dirangsang untuk tumbuh dalam kebebasan, kita “tidak terpikat oleh adanya hubungan-hubungan dan menutup diri pada kesempatan baik yang ditawarkan hidup ini kalau belum ditentukan terlebih dahulu oleh suatu definisi institusional” (Illich, 1984: 65).

Illich berpendapat ada beberapa kemungkinan bagaimana sekolah dapat menguasai orang sepanjang hidup, yaitu dengan dapat “memberi kepastian bahwa mereka akan dapat dipergunakan dalam suatu lembaga” (Illich, 1984: 66), atau yang kita sebut sebagai jaminan kerja ketika telah lulus dari sekolah.

Maka karya dari Illich ini adalah untuk menegaskan jika alih-alih untuk memperbaiki sistem persekolahan yang ada, justru lebih baik membebaskan masyarakat itu sendiri dari ketergantungan atas sekolah. Ia sendiri sangat penuh dengan optimisme dalam argumennya menuju masyarakat tanpa sekolah ini. menurutnya “Karenanya, penghapusan sistem pendidikan formal merupakan akar setiap gerakan pembebasan umat manusia” (Illich, 1984: 66). Dengan membangun jaringan-jaringan belajar yang bersifat swakelola dan demokratis sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif “yang bersifat insidental dan informal”.

Maka jika penulis mencoba meringkas argumennya Illich pada dasarnya ritikan yang ia lontarkan terhadap sekolah adalah menyangkut beberapa hal berikut. *Pertama*, adalah kritik terhadap sekolah sebagai proses institusionalisasi. Proses ini sering menghancurkan kepercayaan diri dan kapasitas diri individu dalam memecahkan persoalan. Proses ini seperti parasit dan kanker yang

membunuh kreativitas anggota masyarakat. *Kedua*, adalah kritik terhadap para ahli dan keahlian yang dihasilkan lembaga pendidikan formal ini. Menurut Illich, mereka itu lebih banyak memberikan kerusakan dari pada manfaat bagi masyarakat. Mereka menganalisis situasi politik dan sekaligus mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Mereka mengontrol produksi informasi dan menentukan mana yang valid dan mana yang tidak. *Ketiga*, para profesional dan institusi yang terlibat dalam institusi sekolah menjadikan proses belajar sebagai komoditas. Untuk mengambil keuntungan, mereka memonopoli produksi informasi, mereka membatasi distribusinya dan mereka menentukan harganya. Tak mengherankan jikalau biaya sekolah di Amerika Latin saat itu sangat tinggi.

Kritik-kritikan tajam yang ada terhadap dunia pendidikan pada sekitar era tahun 1960 hingga tahun 1970-an di Amerika Serikat dan Eropa akhirnya membuka wacana baru mengenai pentingnya membuat desain alternatif-alternatif lain terhadap dunia pendidikan selain lembaga pendidikan formal yang ada. Hal ini tidak bisa dipungkiri, jika keberadaan berbagai alternatif ini adalah dampak dari timbulnya ketimpangan sosial-ekonomis yang terjadi pada saat itu. Akumulasi kekayaan pada segelintir orang yang terjadi di Amerika bukan hanya menciptakan ketimpangan sosial yang akhirnya berdampak pada kebanyakan rakyat miskin Amerika Serikat saja melainkan juga berakibat pada negara-negara disekitar Amerika, terutama sekali adalah dampaknya bagi negara-negara Amerika Latin yang adalah merupakan laboratorium bagi penelitian Ivan Illich dan Freire.

Tahun 1967 di Williamsburg, Amerika Serikat diadakan konferensi mengenai ‘krisis kependidikan di dunia’, menurut mereka ada yang salah mengenai kurikulum yang dipakai hari ini, adanya ketidaksesuaian antara laju ekonomi dengan kemajuan pendidikan yang ada akhirnya mengakibatkan ketidaksesuaian harapan antara teori dan praktek, atau apa yang telah diajarkan disekolah dengan *output* ketika mereka telah lulus. Intinya bagi Fordham ialah;

The conclusion was that formal educational systems had adapted too slowly to the socio-economic changes around them and that they were held back not only by their own conservatism, but also by the inertia of societies themselves (www.infed.org.ideas.non-formal.html).

(kesimpulannya adalah sistem pendidikan formal yang ada terlalu lambat dalam melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan sosial-ekonomi yang ada disekitarnya, dan semua itu bukan hanya dikarenakan oleh konservatisme sistem pendidikan yang ada saja, melainkan juga dikarenakan oleh masyarakat itu sendiri).

Maka untuk menjawab berbagai kritikan yang ada kemudian digiatkanlah berbagai alternatif yang diantaranya adalah pendidikan Non-formal dan pendidikan Informal yang sejatinya adalah berdasarkan konsep *longlive learning*.

C. Alternatif Terhadap Pendidikan Formal

Ketidakpercayaan terhadap lembaga pendidikan formal yang berkembang pada beberapa pihak masyarakat akhirnya membuka alternatif-alternatif lain. Mengambil pengertian yang dikemukakan oleh Prosser dan Ahmed selain pendidikan formal yang selama ini kita ketahui ada dua lagi konsep mengenai pendidikan itu sendiri yaitu:

1. *Informal education: the truly lifelong process whereby every individual acquires attitudes, values, skills and knowledge from daily experience and the educative influences and resources in his or her*

environment - from family and neighbours, from work and play, from the market place, the library and the mass media (www.infed.org/ideas/praxis.html)

(Pendidikan Informal: adalah sebuah proses pembelajaran sejati yang dimana setiap individu belajar untuk bersikap, mendapatkan nilai-nilai, keahlian dan pengetahuan dari pengalaman keseharian dirinya dan kesemua itu ia dapat pelajari berdasarkan lingkungannya – entah itu dari keluarga, lingkungan sekitarnya, dari tempat bermain, kerja, dari swalayan, perpustakaan dan media massa).

2. *Non-formal education: any organised educational activity outside the established formal system - whether operating separately or as an important feature of some broader activity* (www.infed.org/ideas/praxis.html).

(Pendidikan Non-formal ialah: setiap kegiatan yang diorganisir secara baik diluar sistem pendidikan formal yang telah ada – baik itu terlaksana secara terpisah ataupun sebagai tambahan yang penting dalam kegiatan keseharian).

Di bawah ini penulis akan mencoba memberikan beberapa pemaparan mengenai perkembangan hari ini mengenai pengembangan dari ide-ide tentang pembebasan masyarakat terhadap ketergantungan bersekolah. Meskipun beberapa dari ide-ide dasar tersebut akhirnya hari ini telah menjadi komoditas yang mendatangkan laba bagi institusi penyelenggaranya, dan akhirnya kembali justru tidak membebaskan sama sekali bagi golongan yang tidak mampu mengakses pendidikan. Meskipun demikian, penulis juga tidak menutup mata jika ada beberapa orang dan institusi yang memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis dan tanpa imbalan apapun.

1. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal awalnya berasal dari konsep mengenai *longlive learning* dan *adult learning* meskipun dengan latar belakang yang berbeda ketika

mereka menjalankan program ini. Bagi sebagian orang mengikuti program ini adalah untuk mengajarkan dan mengembangkan sikap-sikap yang positif terutama adalah bagi mereka anak-anak yang pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan pada saat mengikuti pendidikan formal.

Pada dasarnya format pendidikan ini dilakukan dalam internal keluarga dan di bawah naungan keluarga. Sehingga norma-norma dan berbagai nilai yang ditanamkan dapat diawasi secara langsung oleh kedua orang tua. Sehingga diharapkan bukan hanya mengenai aspek kognitif saja yang berkembang. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan kebiasaan kita yang melepaskan begitu saja tanggung jawab mengenai pendidikan kepada lembaga formal yang akhirnya begitu saja mempercayai tempat dimana si anak bersekolah.

Keluarga termasuk pada lembaga informal karena keluarga bersifat alami dan kodrati sehingga pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia. Sejatinya sebuah pendidikan meskipun itu adalah pendidikan informal ia berpusat pada lingkungan dan segala jenis institusi yang ada disekitarnya. Maka keliru jika beranggapan dalam pendidikan informal tidak ada unsur-unsur kependidikan.

Pendidikan Keluarga jika ditelusuri lebih jauh “ adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasan (Nurita, 2010: 36). “Keluarga adalah institusi pendidikan yang utama dan bersifat kodrati” (Nurita, 2010: 37).

Keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang saling berkaitan. Sebab, di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Di mana ada orang tua yang ingin

mendidik atau membentuk anaknya, dan pada waktu yang sama ada anak yang menginginkan pendidikan dari orang tua. Dari situlah muncul istilah “Pendidikan Keluarga”. Hal paling khas yang menjadi nilai lebih pendidikan informal dibandingkan model pendidikan lainnya adalah, kemungkinan yang lebih besar akan tergali dan terkelolanya potensi setiap anak secara maksimal.

Ide dasarnya adalah mengaplikasikan aspek kognitif dengan lingkungan sekitar dia. Alan Thomas dalam artikel yang terdapat pada laman infed.org memberikan contoh praktisnya pada pemahat yang ada di Brazil dengan memadukan ilmu matematika dengan praktek keseharian dia sebagai pemahat

“with little schooling, informally acquire a better understanding of the mathematical concepts relevant to their work than do carpenter apprentices enrolled in classes specifically designed to teach those concepts” (http://www.infed.org/biblio/home_education.htm).

Bahkan sesungguhnya seorang anak benar-benar belajar ketika ia berada dilingkungan sekitarnya, baik itu berupa norma-norma yang berlaku ataupun bagaimana kondisi objektif sosio-kulturalnya meskipun tentu ia tetap berada dibawah pengawasan orang tuanya seperti yang ditegaskan oleh Alan Thomas

“the most frequent learning context was that of everyday living. Simply by being around their mothers, talking, arguing and endlessly asking questions, the children were being provided with large amounts of information relevant to growing up in our culture” (http://www.infed.org/biblio/home_education.htm, 11-03-2011).

(sesungguhnya kita memahami makna belajar adalah dari kehidupan keseharian kita. Dengan mudah kita melihat ketika seorang anak berada didekat ibunya sesungguhnya seorang anak itu telah belajar mengenai keahlian berbicara, berargumentasi, serta bertanya tanpa henti, dan dilingkungan sekitar kita pulalah telah tersedia sejumlah besar informasi yang berguna untuk memahami lingkungan sekitar).

Karena pendidikan yang terjadi adalah ada pada sekitar rumah biasanya juga *informal learning* erat kaitannya dengan *Home Education* atau *Home Schooling*.

Pada sekolah, kurikulum menentukan keberlangsungan pengajaran dan pembelajaran, meskipun ini sebenarnya mempermudah dalam proses pengajaran, akan tetapi kurikulum yang telah ditetapkan sesungguhnya telah menentukan beragam pengajaran yang akan diajarkan pada anak didik tanpa melihat latar belakang si anak didik itu. Padahal ada ketidaksesuaian antara kemampuan anak terhadap kurikulum yang ada, "*Curriculum logic and child logic do not equate*" (http://www.infed.org/biblio/home_education.htm, 11-03-2011). Kita bisa melihat contoh adalah Einstein yang dianggap oleh gurunya sebagai anak yang tidak pintar dan hanya menghambat keberlangsungan pembelajaran dikelas, akhirnya Einstein dikeluarkan oleh sekolahnya. Ibunya Einstein tidak menyerah dan menerima penilaian "sang guru" begitu saja, kemudian ia mendidik Einstein didalam keluarganya, dan hasilnya -sekolah dan guru yang mengeluarkan dia karena tidak dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran karena selalu melamun dan bernilai jelek ketika ujian- sejarah membuktikan jika sang guru terbukti keliru atas penilaiannya tersebut.

Akan tetapi bukan berarti *informal learning* adalah sempurna. Karena bagaimana pun juga sebaiknya seorang ibu dan kondisi keluarga akan ada kekurangannya juga. Terutama adalah mengenai beberapa kemampuan yang belum tentu keluarga dapat diandalkan sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran yang baik. Seperti yang diungkapkan dalam artikel Alan Thomas,

jika mempraktekan ide “sekolah” dalam rumah adalah bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu beberapa keluarga yang memiliki uang lebih terkadang mendatangkan seorang guru privat ke rumah untuk mengajarkan kemampuan yang tidak dapat diajarkan oleh keluarga.

B. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal biasanya berupa beragam kemampuan yang tidak diajarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal. Ragamnya berupa-rupa ada yang berupa kursus menjahit hingga kelas-kelas politik yang diadakan secara swakelola oleh komunitas-komunitas tertentu, ataupun hingga kelas filologi seperti yang penulis ikuti. Kelas-kelas itu juga ada yang berbayar yang terkadang bisa membuat geleng-geleng kepala dan ada pula kelas-kelas yang dikelola secara swasembada dan gratis.

Pendidikan Non-formal itu sendiri adalah:

“any organized, systematic educational activity, carried on outside the framework of the formal system, to provide selected types of learning to particular subgroups in the population, adults as well as children”
(Coombs dan Ahmed, 1974: 8).

(pengorganisasian setiap kegiatan pembelajaran, yang berada pada diluar sistem pendidikan formal yang ada, dan menyediakan beberapa tipe pembelajaran atau yang akan diajarkan kepada sebagian kelompok yang ada pada masyarakat, baik itu pada orang dewasa dan/ataupun pada anak-anak)

Kata-kata mengenai pengorganisasian dan pengelompokan yang ada pada pendidikan non-formal mungkin akan cenderung terdengar seperti yang ada pada pendidikan formal, sebagai contoh adalah konsep mengenai kurikulum, pengorganisasian pengajaran, presensi pengajar dan yang belajar, tugas dan

hadiah ketika seorang murid berhasil menjalankan pekerjaannya tapi ini sesungguhnya berbeda karena ketika seorang anak mengikuti pendidikan pada lembaga non-formal sama sekali tidak ada paksaan didalamnya.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, fungsi dari pendidikan nonformal ialah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Menurut Saleh Marzuki (2010) setidaknya ada empat konsep dasar utama mengenai pendidikan Non-Formal. Keempat konsep dasar ini merupakan kerangka umum untuk menganalisis atau menerangkan fenomena-fenomena pendidikan yang terjadi di masyarakat.

Pertama adalah, pendidikan mesti diposisikan lebih dahulu sebagai proses yang berkesinambungan untuk mengubah dirinya ataupun orang lain selama ia hidup. “Pendidikan hendaknya lebih dari sekedar masalah akademik atau perolehan pengetahuan, *skill* dan mata pelajaran konvensional, melainkan harus mencakup berbagai kecakapan yang diperlukan” (Marzuki, 2010: 136), yang tentu saja bertujuan untuk menjadi manusia yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Kedua adalah pemenuhan “kebutuhan belajar minimum yang esensial (*minimum essential learning needs*)” (Marzuki, 2010: 137). Menurut Maruki yang dimaksud *kebutuhan belajar* yang disebutkan adalah “sesuatu yang harus

diketahui dan dapat dikerjakan oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum mereka merasa bertanggung jawab sebagai orang dewasa (Marzuki, 2010: 137-138).

Dalam penjelasan kebutuhan minimum, Marzuki mengutip Coombs jika terdapat enam unsur.

“(1) sikap positif terhadap kerja sama dan membantu keluarga serta anggotanya, terhadap pekerjaan, terhadap masyarakat, terhadap pembangunan bangsa, dan terhadap nilai-nilai etis; (2) keaksaraan fungsional yang meliputi membaca dengan paham artinya, menulis dengan huruf yang benar, meminta informasi, dan menghitung hal-hal yang umum; (3) cara pandang ilmiah dan pemahaman sederhana tentang proses-proses alamiah, seperti terhadap kesehatan, nutrisi, lingkungan dan perlindungan terhadapnya; (4) pengetahuan dan *skills* fungsional untuk mengasuh keluarga dan menjalankan suatu rumah tangga; (5) pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mencari nafkah; bukan hanya *skill* guna memasuki suatu pekerjaan lokal, tetapi juga untuk pertanian dan di luar pertanian; (6) pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk berperan serta sebagai warga negara” (Marzuki, 2010: 138).

Konsep dasar ketiga ialah berdasarkan adanya “proses pertumbuhan manusia dalam masyarakat transisi memerlukan layanan pendidikan guna membantu pertumbuhan individu secara efektif” (Marzuki, 2010: 138). Karena pada masa itu ada kemungkinan kurangnya persiapan-persiapan dan perencanaan ataupun praktik yang kurang maksimal sehingga kemungkinan akan ada kekurangan dalam pemenuhan hal minimum tadi baik itu untuk anak laki-laki dan ataupun untuk anak perempuan. Khususnya di sekitar wilayah pedesaan yang relatif pendidikan disana belum semaju kota yang telah tersentuh oleh modernisasi.

Konsep dasar dasar yang keempat adalah terkait dengan peran pendidikan dalam pengembangan wilayah pedesaan tadi. Hal ini didasarkan pada asumsi jika

“hampir semua negara sedang berkembang ditandai dengan kesulitan ekonomi dan dualisme sosial, yaitu dualisme antara sektor perkotaan...dan sektor pedesaan” (Marzuki, 2010: 139). Kedua teritori ini memiliki struktur masyarakatnya sendiri-sendiri. Masing-masing dari kedua struktur ini khas dan unik. Kota dengan segala modernisasi didalamnya, dan desa dengan sistem dan budaya feodal yang mengakar kuat. Pemahaman konsep ini adalah membuka peluang untuk memahami dalam aspek sosiologis kedua wilayah. Sehingga diharapkan ada kebijakan pendidikan yang tepat yang diambil.

Pada pendidikan non-formal dan formal pada umumnya berbeda dalam hal cara pengusahaannya, peraturan dan kelebagaannya, dan dalam beberapa kasus mungkin dalam tujuan kependidikan, dan orang-orang yang dilayani oleh institusi itu sendiri.

Pendidikan non-formal bahkan kerap kali dianggap sebagai pemecahan masalah atas keterbatasan kemampuan untuk mengakses pendidikan formal secara reguler. Hal ini disadari benar oleh Bank Dunia yang pada tahun 1970 melakukan riset di beberapa dunia ketiga yang diantaranya adalah India hasil mengenai riset yang dilakukan oleh Ahmed dan Combs itu kemudian dibukukan dan diterbitkan dengan judul *Attacking Rural Poverty* oleh Jhon Hopkins University Press.